

Problematika Struktural Petani dalam Keberlanjutan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Indonesia

Musta'in Mashud

Pengantar

Lima puluh tahun lalu, tepatnya 27 April 1952 dalam pidato pada acara Peletakan Batu Pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia (UI) di Bogor, Presiden Sukarno berucap "... apa yang saya hendak katakan itu, adalah amat penting, bahkan mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari ... oleh karena, soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat." Sukarno menyadari betul betapa vitalnya ketahanan pangan ini bagi kelangsungan kehidupan bangsanya. Namun, ironisnya, pemerintahan Sukarno jatuh pada tahun 1965, salah satu pemicunya adalah krisis pangan nasional yang ditandai membungahnya harga bahan pangan, khususnya beras. Peristiwa yang hampir sama terulang kembali pada saat jatuhnya pemerintahan Soeharto tahun 1998, yakni dalam waktu dua bulan harga beras meningkat tiga kali lipat dan masyarakat kota menyerbu toko dan supermarket untuk memborong bahan pangan.

Tidak salah jika David Nelson, seorang kolumnis di *Newsweek* pada bulan April 1996 mengatakan bahwa *shortage of food can lead to a civil war* (kekurangan pangan dapat menimbulkan perang saudara). Kegundahan Presiden Sukarno saat itu didasarkan pada analisis yang menunjukkan pada tahun 1952 terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan beras Indonesia. Pada saat itu, dengan jumlah penduduk sebanyak 75 juta dan konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 86 kg (setara dengan 1.712 kkal/hari), maka kebutuhan beras dalam negeri mencapai 6,45 juta ton, sementara produksi beras nasional hanya mencapai 5,5 juta ton, maka terjadi defisit sebesar 0,95 juta ton (15% dari kebutuhan).

Bung Karno, kemudian memproyeksikan delapan tahun ke depan, yaitu tahun 1960. Dengan asumsi konsumsi beras per kapita tetap dan kemampuan memproduksi padi juga tetap, apabila penduduk bertambah delapan juta jiwa menjadi 83 juta tahun 1960, maka kebutuhan impor beras meningkat menjadi 2,2 juta ton (dengan tingkat konsumsi energi 1.712 kkal/hari). Apabila konsumsi energi yang ingin dipenuhi sesuai standar kecukupan (2.250 kkal/hari/orang), maka kebutuhan impor akan mencapai 6,3 juta ton, yang berarti 50 persen kebutuhan beras dipenuhi dari impor. Lantas, apabila kemampuan untuk memproduksi lemah dan devisa ataupun utang luar negeri untuk mengimpor tidak ada, maka rata-rata konsumsi energi per kapita akan menjadi 1.547 kkal/hari. Pada tingkat konsumsi energi seperti itu, orang tidak dapat hidup sehat, apalagi produktif.

Kondisi tersebut menurut Bung Karno akan menyebabkan "rakyat kelaparan, kocar-kacir dan menyedihkan secara permanen kuadrat."

Dalam kalimat yang sangat tegas Bung Karno menyatakan "... bahwa kita sekarang ini menghadapi hari kemudian yang amat ngeri, bahkan suatu todoman pistol 'mau hidup atau mau mati'...". Kondisi ancaman "todongan pistol" tersebut ternyata sampai saat ini masih relevan untuk tetap diwaspadai. Walaupun dalam 50 tahun produksi padi dapat ditingkatkan 5,9 kali lipat, (dari 5,5 juta ton tahun 1952 menjadi 32,5 tahun 2002), dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi (dari 75 juta menjadi 212 juta jiwa) dan peningkatan konsumsi beras per kapita per tahun yang besar (dari 86 kg menjadi 142 kg), Indonesia masih harus mengimpor beras sekitar satu juta ton, suatu jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan total kebutuhan. Sebagai perbandingan, satu juta ton beras impor tahun 2002 hanya sekitar tiga persen dari produksi domestik, sementara 50 tahun lalu jumlah itu setara dengan 15 persen. Fakta ini dapat dinilai sebagai prestasi dari para petani kita.

Namun demikian,, menurut Achmad Suryana dan Sudi Mardianto, ancaman kerawanan pangan tersebut pada waktu yang akan datang masih tetap relevan apabila: (1) tingkat pertumbuhan penduduk tidak dapat ditekan (saat ini 1,49 %/tahun), (2) kapasitas produksi pangan nasional tidak dapat dipelihara atau dipertahankan, antara lain karena konversi lahan yang tidak terkendali, dan (3) tingkat konsumsi beras/kapita tidak dapat diturunkan. Kebijakan pertanian, khususnya menyangkut peningkatan nilai tambah berbasis potensi

lokal, hendaknya mempertimbangkan pendekatan sosiologis. Minimnya kepemilikan lahan pada petani, tidaklah mudah membuat kebijakan yang mengarah pada peningkatan nilai tambah hasil pertanian.

Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, pemerintah sering mengklaim sejumlah keberhasilan. Beberapa klaim keberhasilan itu a.l. adalah penyelesaian konflik bersenjata Aceh; penyelesaian konflik Papua-Irian Jaya Barat-Majelis Rakyat Papua; penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Timtim; penyelesaian masalah embargo militer dari AS; penyelesaian masalah APBN yang tidak sehat; penyelesaian masalah utang dengan IMF; penyelesaian masalah Dipasena Lampung; penyelesaian masalah Cepu antara Exxon dan Pertamina; penyelesaian kasus Texmaco; pembubaran CGI, dan keberhasilan mengatasi ancaman arbitrase Cemex dan Karahabodas.

Jika dicermati sejumlah klaim keberhasilan pemerintah di atas, ada satu yang tidak disebut, yakni keberhasilan menjaga ketahanan pangan. Boleh jadi, persoalan pangan memang sengaja tidak termasuk ke dalam daftar, karena persoalannya memang belum bisa diatasi. Beberapa klaim di atas, jika diperhatikan secara seksama, sebetulnya masih pada tataran pertahanan teritorial. Sektor ketahanan pangan apalagi kedaulatan pangan belum tersentuh sama sekali. Padahal, kedaulatan pangan merupakan prasyarat demokratisasi.

Barangkali benar apa yang sering dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di berbagai kesempatan "*say what we do!*". Kami sedang bekerja keras menyelesaikan dan bekerja untuk rakyat. Boleh jadi hal itu merupakan pengakuan terbuka meski secara implisit; sekaligus disadari bahwa persoalan ketahanan pangan memang pekerjaan yang cukup rumit dan problematik.

Ketahanan Pangan

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO, disebutkan bahwa paling tidak ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu:

1. Kecukupan ketersediaan pangan;
2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun.
3. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan serta
4. Kualitas/keamanan pangan

Keempat komponen tersebut akan digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Keempat indikator ini merupakan indikator utama untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dihitung bertahap dengan cara menggabungkan keempat komponen indikator ketahanan pangan tersebut,

Persoalan ketersediaan pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan secara sosiologis bukan hanya terletak pada ranah teknologi dengan segala inovasinya, tetapi (juga) pada persoalan yang lebih substansial, yakni penegasan kedudukan petani dan kebijakan negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Sejak Orde Baru hingga 10 tahun paska reformasi, belum terlihat adanya kebijakan negara, langsung atau pun tidak langsung, yang mampu meningkatkan peran petani secara signifikan dalam produksi pangan nasional. Selama para petani masih belum tersentuh kebijakan yang proporsional, selama itu pula persoalan pangan nasional akan tetap problematik. Tulisan singkat berikut akan menfokuskan pada persoalan posisi petani dalam keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan dari perspektif sosiologis dan dalam beberapa bagian juga perspektif ekonomi politik pangan.

untuk mendapatkan satu indeks ketahanan pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk proses kehidupan. Tanpa adanya kecukupan pangan, manusia tidak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan sempurna, baik secara fisik, mental, maupun intelektual. Oleh karena itu, ketersediaan pangan merupakan tanggung jawab mutlak yang harus diemban oleh pemerintah, dengan dukungan penuh masyarakat. Akibat paling parah dari desain ekonomi tanpa basis rakyat adalah hancurnya kedaulatan pangan. Ini karena pangan sektor inti dari pembangunan sebuah bangsa. Sukses pangan adalah sukses pemerintah. Pangan nilai fundamental dari sebuah program yang dijalankan suatu pemerintahan.

Ketersediaan pangan dalam rumah tangga yang dipakai dalam pengukuran mengacu pada pangan yang

cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Penentuan jangka waktu ketersediaan makanan pokok di pedesaan biasanya dilihat dengan mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya (Suharjo dkk, 1985:45). Disadari bahwa ukuran ketersediaan pangan yang mengacu pada jarak waktu antara satu musim panen dengan musim panen berikutnya hanya berlaku pada rumah tangga dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian pokok. Dengan kata lain, ukuran ketersediaan makanan pokok tersebut memiliki kelemahan jika diterapkan pada rumah tangga yang memiliki sumber penghasilan dari sektor non-pertanian.

Berbagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan nasional telah dilakukan semenjak masa Orde Baru. Misalnya, pada tahun 1984 Indonesia pernah mengukir prestasi gemilang dengan mampu mencapai swasembada pangan nasional, namun tahun-tahun selanjutnya prestasi tersebut semakin merosot sehingga upaya-upaya mempertahankan dan mencukupi kebutuhan pangan nasional semakin sulit dilakukan. Proyek pembukaan lahan pertanian sejuta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah, implementasi Bimas, Insus dan Supra Insus, tampaknya tidak memberikan manfaat berarti, bahkan dalam dasawarsa terakhir kita terjebak dalam kesenjangan antara kebutuhan pangan dan produksi pangan nasional sehingga kebijakan impor beras dijadikan sebagai solusi instan oleh pemerintah.

Padat tanggal 11 Juni 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) di Jatiluhur, Jawa Barat. Salah satu prioritas yang diusung dalam RPPK adalah ketahanan pangan. Program ini dicanangkan sebagai jawaban atas masalah serius yang dihadapi Indonesia selama dua dekade belakangan ini. Karena menurut simulasi Irawan (2003) pada 2020 kita memerlukan beras sebanyak 40 juta ton untuk keperluan konsumsi. Kalau masalah penyediaan pangan ini tidak bisa diatasi, maka bangsa ini dengan segala problem yang dihadapinya saat ini, kemungkinan akan mengalami bencana sosial seperti yang dihadapi oleh beberapa negara afrika dalam bentuk kelaparan dan konflik sosial.

Sementara itu, ketahanan pangan selain merupakan hal yang sangat strategis dan penting, juga sebagai bagian dari ketahanan nasional. Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan yang dirumuskannya sebagai usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Ketahanan pangan selain merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan, juga berkaitan dengan pemenuhan hak azasi manusia dan ketahanan nasional. Kemiskinan, kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk dari pengabaian hak azasi manusia dan ancaman atas ketahanan nasional. Dalam konteks inilah mengapa usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan.

Sejak lima tahun terakhir, rakyat Indonesia sering dikejutkan dengan berita banyaknya anak-anak yang menderita gizi buruk atau bahkan busung lapar di beberapa wilayah. Sebagai contoh, 66.685 anak di Nusa Tenggara. Sekitar 49.000 anak di

Nusa Tenggara Barat, 425 anak di Boyolali, dan 11.368 anak di Sumba Barat, menderita gizi buruk yang sangat memprihatinkan, dan sebagian dari mereka meninggal dunia karena orangtuanya tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anaknya (Kompas, 7 Januari 2008). Dan berdasarkan peta orang lapar yang dibuat oleh *Food and Agricultural Organization* (FAO), hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah rawan pangan. Kenapa hal ini sampai terjadi? Padahal, Indonesia dikenal dengan negeri yang subur dan makmur.

Sebelum melihat persoalan dibalik gizi buruk dan busung lapar, ada baiknya dilihat dulu definisi dari "ketahanan pangan". Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, pada pasal 1 ayat 17, menyebutkan "ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". Dalam UU ini, ketahanan pangan ditujukan kepada kebutuhan rumah tangga, karena asumsi bahwa rumah tangga adalah bentuk kesatuan masyarakat terkecil di Indonesia. Bandingkan definisi ini dengan pengertian *food security* (ketahanan pangan) yang tertera dalam *Rome Declaration and World Food Summit Plan of Action*, yaitu "*food security exists when all people, at all times, have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs for an active and healthy life*".

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan: petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan.

Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri (Krisnamurti, Jurnal Ekonomi Rakyat Artikel - Th. II - No. 7 - Oktober 2003)

Hal lain yang penting diperhatikan adalah stabilitas ketersediaan pangan. Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga ini biasanya diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari. Satu rumah tangga dikatakan memiliki stabilitas ketersediaan pangan jika mempunyai persediaan pangan diatas *cutting point* dan anggota rumah tangga dapat makan 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan kebiasaan makan penduduk di daerah tersebut.

Jika di daerah tertentu masyarakat kita mempunyai kebiasaan makan 3 (tiga) kali sehari, frekuensi makan sebenarnya dapat menggambarkan keberlanjutan ketersediaan pangan dalam rumah tangga. Dalam satu rumah tangga, salah satu cara untuk mempertahankan ketersediaan pangan dalam jangka waktu tertentu adalah dengan mengurangi frekuensi makan atau mengombinasikan bahan makanan pokok (misal beras dengan ubi kayu). Penelitian yang dilakukan PPK-LIPI di beberapa daerah di Jawa Barat juga menemukan bahwa mengurangi frekuensi makan merupakan salah satu strategi rumah tangga untuk memperpanjang ketahanan pangan mereka (Raharto, 1999; Romdiati, 1999).

Penggunaan frekuensi makan sebanyak 3 kali atau lebih sebagai indikator kecuku-

pan makan didasarkan pada kondisi nyata di desa-desa (berdasarkan penelitian PPK-LIPI), dimana rumah tangga yang memiliki persediaan makanan pokok 'cukup' pada umumnya makan sebanyak 3 kali per hari. Jika mayoritas rumah tangga di satu desa, misalnya, hanya makan dua kali per hari, kondisi ini semata-mata merupakan suatu strategi rumah tangga agar persediaan makanan pokok mereka tidak segera habis, karena dengan frekuensi makan tiga kali sehari, kebanyakan rumah tangga tidak bisa bertahan untuk tetap memiliki persediaan makanan pokok hingga panen berikutnya.

Hal berikutnya yang juga perlu diperhatikan adalah keterjangkauan pangan oleh masyarakat. Sebagai indikator aksesibilitas/keterjangkauan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga a.l. berdasar dari tingkat kemudahan rumah tangga dalam memperoleh pangan, yang diukur dari pemilihan lahan serta cara rumah tangga untuk memperoleh pangan. Akses yang diukur berdasarkan pemilihan lahan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori:

- Akses langsung (*direct access*), jika rumah tangga memiliki lahan sawah/ladang
- Akses tidak langsung (*indirect access*) jika rumah tangga tidak memiliki lahan sawah/ladang.

Cara rumah tangga memperoleh pangan juga dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu: (1) produksi sendiri dan (2) membeli. Indikator aksesibilitas/keterjangkauan rumah tangga terhadap pangan dikelompokkan dalam kategori seperti pada tabel berikut:

Tabel 2 : Penetapan indikator aksesibilitas/keterjangkauan pangan di tingkat rumah tangga

Pemilikan sawah/ ladang	Cara rumah tangga memperoleh bahan pangan	
	Akses langsung	Akses tidak langsung
Punya	Akses langsung	Akses tidak langsung
Tidak punya	Akses tidak langsung	

Dari pengukuran indikator aksesibilitas ini kemudian diukur indikator stabilitas ketersediaan pangan yang merupakan penggabungan dari stabilitas ketersediaan pangan dan aksesibilitas terhadap pangan. Indikator stabilitas ketersediaan pangan ini menunjukkan suatu rumah tangga apakah: Mempunyai persediaan pangan cukup; Konsumsi rumah tangga normal dan Mempunyai akses langsung terhadap pangan (Raharto, 1999; Romdiati, 1999). Indikator kontinuitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.: Penetapan indikator kontinuitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga

Akses terhadap pangan	Stailitas ketersediaan pangan rumah tangga		
	Stabil;	Kurang stabil	Tidak stabil
Akses langsung	Kontinyu	Kurang kontinyu	Tidakkontinyu
Akses tidak langsung	Kurang kontinyu	Tidak kontinyu	Tidak kontinyu

Sementara itu, kualitas/keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi relatif lebih sulit pengukurannya oleh karena melibatkan berbagai macam jenis makanan dengan kandungan gizi yang

berbeda-beda, sehingga ukuran keamanan pangan hanya dilihat secara nominal: 'ada' atau 'tidak'nya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Karena itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk-pauk) sehari-hari yang mengandung protein hewani dan/atau nabati.

Berdasarkan kriteria ini rumah tangga dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori: (i) rumah tangga dengan kualitas pangan baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein hewani dan nabati atau protein hewani saja; (ii) rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein nabati saja, (iii) rumah tangga dengan kualitas pangan tidak baik adalah rumah tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein baik hewani

maupun nabati. Ukuran kualitas pangan ini tidak mempertimbangkan jenis makanan pokok. Alasan yang mendasari adalah karena kandungan energi dan karbohidrat antara beras, jagung dan ubi kayu/tiwul sebagai makanan pokok di desa-desa penelitian tidak berbeda secara signifikan.

Indeks ketahanan pangan

Indeks ketahanan pangan dihitung dengan cara mengkombinasikan keempat indikator ketahanan pangan (ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan, keberlanjutan dan kualitas/keamanan pangan). Kombinasi antara kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan memberikan indikator stabilitas ketersediaan pangan. Selanjutnya kombinasi antara stabilitas ketersediaan pangan dengan akses terhadap pangan memberikan indikator kontinyuitas ketersediaan pangan. Indeks ketahanan pangan diukur berdasarkan gabungan antara indikator kontinyuitas ketersediaan pangan dengan kualitas / keamanan pangan.

Indeks ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dikategorikan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4 : Indeks ketahanan pangan rumah tangga

Kontinyuitas ketersediaan pangan	Kualitas/keamanan pangan: Konsumsi protein hewani dan/atau nabati		
	Protein hewani dan nabati/protein hewani saja	Protein nabati saja	Tidak ada konsumsi protein hewani, dan nabati
Kontinyu	Tahan	Kurang tahan	Tidak tahan
Kurang kontinyu	Kurang tahan	Tidak tahan	Tidak tahan
Tidak kontinyu	Tidak tahan	Tidak tahan	Tidak tahan

Raharto (1999) dan Romdiati (1999) mengemukakan bahwa berdasarkan matrik tersebut, maka rumah tangga dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Rumah tangga tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki persediaan pangan/makanan pokok secara kontinyu (diukur dari persediaan makan selama jangka masa satu panen dengan panen berikutnya dengan frekuensi makan 3 kali atau lebih per hari serta akses langsung) dan memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati atau protein hewani saja
2. Rumah tangga kurang tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki:
 - a. Kontyuitas pangan/makanan pokok kontinyu tetapi hanya mempunyai pengeluaran untuk protein nabati saja

- b. Kontinuitas ketersediaan pangan/makanan kurang kontinyu dan mempunyai pengeluaran untuk protein hewani dan nabati
3. Rumah tangga tidak tahan pangan adalah rumah tangga yang dicirikan oleh:
 - a. Kontinyuitas ketersediaan pangan kontinyu, tetapi tidak memiliki pengeluaran untuk protein hewani maupun nabati
 - b. Kontinyuitas ketersediaan pangan kontinyu kurang kontinyu dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein hewani atau nabati, atau tidak untuk kedua-duanya.
 - c. Kontinyuitas ketersediaan pangan tidak kontinyu walaupun memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati
 - d. Kontinyuitas ketersediaan pangan tidak kontinyu dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein nabati saja, atau tidak untuk kedua-duanya.

Menurut Menteri Pertanian, Anton Apriantono, sektor pangan dapat menghasilkan PDB, lapangan kerja, bahan baku industri, devisa negara, pendapatan rumah tangga, promosi sektor andalan dan pariwisata, dan penanggulangan kemiskinan. Sayangnya, dalam riset Hari Respati (2007), peningkatan produksi pangan tidak sebanding dengan kebutuhan pangan. Akibatnya, pemerintah menyelesaikannya dengan impor beras. Sebuah solusi pragmatis yang merugikan petani.

Rendahnya laju peningkatan produksi pangan dan terus menurunnya produksi di Indonesia antara lain disebabkan oleh: (1) produktivitas tanaman pangan yang masih rendah dan cenderung terus menurun; (2) luas areal penanaman tanaman pangan yang terus menurun khususnya di lahan pertanian pangan produktif di pulau Jawa. Kombinasi kedua faktor di atas memastikan laju pertumbuhan produksi dari tahun ke tahun yang cenderung terus menurun (Hutapea dan Mashar, 2005). Rata-rata produktivitas padi saat ini adalah 4,4 ton/ha, jagung 3,2 ton/ha dan kedelai 1,19 ton/ha (Purba dan Las, 2002). Jika dibanding dengan negara produsen pangan lain di dunia khususnya beras, produktivitas padi di Indonesia ada pada peringkat ke 29. Australia memiliki produktivitas rata-rata 9,5 ton/ha, Jepang 6,65 ton/ha dan Cina 6,35 ton/ha (FAO, 1993).

Faktor dominan penyebab rendahnya produktivitas tanaman pangan di Indonesia antara lain disebabkan oleh: (a) penerapan teknologi budidaya di lapangan yang masih rendah; (b) tingkat kesuburan lahan yang terus menurun, dan (c) eksplorasi potensi genetik tanaman yang masih belum optimal (Kush, 2002). Rendahnya penerapan teknologi budidaya tampak dari besarnya kesenjangan potensi produksi dari hasil penelitian dengan hasil di lapangan yang diperoleh oleh petani. Hal ini disebabkan karena pemahaman dan penguasaan penerapan paket teknologi baru yang dipahami oleh petani belum secara utuh sehingga penerapan teknologinya sepotong-sepotong (Mashar, 2000). Seperti penggunaan pupuk yang tidak tepat, penggunaan bibit unggul dan cara pemeliharaan yang belum optimal, kecenderungan menggunakan input pupuk kimia yang terus menerus, tidak menggunakan pergiliran tanaman, kehilangan pasca panen yang masih tinggi sehingga mencapai rata-rata 20 % dan memakai air irigasi yang tidak efisien. Rendahnya produktivitas dan daya saing komoditi tanaman pangan ini menyebabkan turunnya minat petani untuk mengembangkan usaha budidaya pangannya, sehingga dalam skala luas mempengaruhi produksi nasional.

Revolusi hijau dengan menggunakan pupuk dan pestisida ternyata berdampak negatif pada kesuburan tanah yang berkelanjutan dan memicu terjadinya mutasi hama dan patogen yang tidak diinginkan. Pemakaian pupuk kimia, alkali dan pestisida yang terus menerus menyebabkan terakumulasinya residu yang berbahaya bagi lingkungan. Akibatnya disamping hilangnya mikroba pengendali keseimbangan daya dukung kesuburan tanah dan terjadi ketidakseimbangan mineral tanah, juga tanah yang dijadikan lahan budidaya tidak dapat lagi memberikan kontribusi pada peningkatan produktivitas karena telah mencapai titik jenuh (*Levelling Off*).

Eksplorasi potensi genetik tanaman yang masih belum optimal tampak pada kesenjangan hasil petani dan hasil produktivitas di luar negeri atau hasil dalam penelitian. Dalam hal ini teknologi pemuliaan telah mengalami kemajuan yang cukup berarti dalam menciptakan berbagai varietas unggul berpotensi produksi tinggi. Meskipun upaya breeding modern, teknologi transgenik dan hibrida dirancang agar tanaman yang dikehendaki memiliki kemampuan genetik produksi tinggi (Kush, 2002), tetapi jika dalam menerapkannya di lapangan tidak sempurna, maka performa keunggulan genetiknya tidak nampak.

Pertanian Berkelanjutan dan Revitalisasi Pertanian

Menurut pakar ekonomi pertanian dari Bogor, Dr.Pancar Simatupang, kebijakan pangan pada era Orba kurang begitu berhasil dan akar utama kesalahannya terletak pada sistem monopoli pemerintah dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan pangan selama ini. Monopoli dalam formulasi kebijakan pangan telah menyebabkan timbulnya arogansi penguasa (presiden dan menteri) sehingga tidak menghiraukan aspirasi, informasi, buah pikiran dan koreksi masyarakat. Praktek demikian merupakan salah satu kegagalan kebijakan pangan (*government's failure*) karena tidak partisipatif dan menumbuh-kembangkan "*rational ignorant*", suatu sikap yang tumbuh di masyarakat untuk memilih diam saja dan tidak peduli terhadap kebijakan pangan karena menganggap usul atau kritik konstruktifnya tidak akan ditanggapi oleh eksekutif. Monopoli perumusan kebijakan juga menimbulkan distorsi pasar politik (*political marketplace failure*) karena menjadi rentan terhadap manipulasi oportunistik, digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri. Pada gilirannya, hal ini menimbulkan praktek KKN dalam implementasi kebijakan pangan.

Menurut Menteri Pertanian, Anton Apriantono, sektor pangan dapat menghasilkan PDB, lapangan kerja, bahan baku industri, devisa negara, pendapatan rumah tangga, promosi sektor andalan dan pariwisata, dan penanggulangan kemiskinan. Sayangnya, dalam riset Hari Respati (2007), peningkatan produksi pangan tidak sebanding dengan kebutuhan pangan. Akibatnya, pemerintah menyelesaikannya dengan impor beras. Sebuah solusi pragmatis yang merugikan petani.

Jauh sebelum pemerintah mendengungkan program revitalisasi pertanian yang konon akan menyelesaikan krisis pertanian di Indonesia, sebenarnya sudah banyak pihak yang mengkampanyekan Pertanian Ber-

kelanjutan (selanjutnya disebut PB) sebagai alternatif. PB mengandung pengertian bahwa petani harus mempunyai kedaulatan produksi yang dapat menjamin keberlanjutan ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Pemberdayaan ekonomi pertanian dapat dilakukan a.l. dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kemandirian petani melalui peningkatan produktifitas dan efisiensi produksi pertanian. Hal ini dilakukan dengan pengembangan pertanian organik, tata kelola produksi yang mendukung ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, peningkatan pendapatan dengan usaha ekonomi produktif dan manajemen pasca panen, serta peningkatan posisi tawar dan akses dalam pasar produksi pertanian rakyat. Dalam perspektif ekonomi, PB melalui inovasi teknis produksinya sesungguhnya bisa menjawab persoalan ekonomi mikro pertanian. PB melakukan efisiensi produksi dengan menekan input luar, serta meningkatkan produktifitas dengan aplikasi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. PB juga berusaha menambah pendapatan rumah tangga petani dengan produksi pasca panen.

Namun, penyelesaian persoalan pada aspek ekonomi mikro dan teknis seperti di atas tidak cukup untuk memajukan kesejahteraan petani. Kita harus melihat lebih dalam pada persoalan ekonomi makro. Pada kacamata ekonomi makro, petani sebagai individu-individu produsen menjadi bagian dari struktur ekonomi pada suatu wilayah atau negara. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah bisa menjamin tata perekonomian yang dapat mensejahterakan petani dengan kebijakan makro yang memihak kepentingan petani produsen. Namun, seperti sudah dinyatakan di awal tulisan, hal tersebut masih jauh dari harapan.

Kepentingan dan perlindungan petani harus diutamakan, terutama untuk menikmati harga wajar; tetapi wujud kebijakan perlindungan itu belum jelas. Salah satu bentuknya adalah kebijakan bantuan subsidi.

Namun, lalu muncul kebijakan pemerintah menutup keran impor, yang dinilai sebagai salah satu cara efektif untuk membantu menstabilkan harga beras di tingkat petani. Jika ini terus dijalankan, sedikit banyak petani bisa terbantu. Kebijakan menutup impor beras harus diteruskan karena dampaknya relatif membaik, membantu memperbaiki harga di tingkat petani. Perdagangan antarpulau juga menggairahkan.

Sejak reformasi bergulir, gagasan revitalisasi sektor pertanian sudah dicanangkan. Tetapi, program ini masih menyisakan berbagai problem mendasar. Misalnya, secara normatif, gagasan kedaulatan pangan belum menjadi tujuan negara dan masyarakat umum. Padahal, kedaulatan pangan penjabaran dari salah satu cita-cita bangsa: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya makna kesejahteraan umum adalah kedaulatan pangan secara menyeluruh.

Sayangnya, saat ini kita masih mendapati tujuh masalah pertanian yang sangat serius. Pertama, kesulitan mendapat akses tenaga kerja dikarenakan minimnya peminat pertanian. Kedua, kesulitan penambahan lahan pertanian. Ketiga, kesulitan mendapat alat produksi, baik karena kelangkaan maupun tidak mampu membelinya. Keempat, kesulitan mendapat kestabilan harga. Kelima, terdapat intervensi politik yang kadang tidak sesuai kebutuhan. Keenam, kesulitan meng-

hasilkan produk berkualitas sehingga kalah dengan produk impor. Ketujuh, kesulitan beban bayar pajak tidak langsung. Beberapa problem itulah yang pada akhirnya menyebabkan sektor pertanian gagal menyumbang PDB secara signifikan.

Paling tidak ada tiga dampak krisis ekonomi terhadap masalah pangan, yakni penurunan daya beli masyarakat, kemerosotan gizi anak dan penurunan produksi pangan (padi dan palawija) sehingga Indonesia terpaksa harus mengimpor beras sebanyak 5,8 juta ton pada tahun 1998. Memang, pangan (terutama beras) menjadi masalah yang krusial. Menurut Prof Bustanul Arifin (2007), karena bereslah hampir semua rezim kita jatuh atau dijatuhkan. Ketika sebuah rezim lebih memilih menomorduakan kedaulatan pangan (memenuhi kebutuhan beras rakyat), dengan sendirinya ia sedang menggali lubang kuburnya. Karena itu, petuaah ekonom pastilah seirama: jangan main-main dengan beras. Beras menjadi komoditas penting terutama dalam hubungannya dengan sosial, politik, bahkan pertahanan dan keamanan. Begitu pentingnya komoditas beras sampai-sampai dalam berbagai kesempatan SBY menyatakan pemerintah sedang membangun ekonomi nasional dengan fokus pada tiga jalur. Salah satunya revitalisasi pertanian.

Jalur pertanian jelaslah usaha yang mendapatkan beras secara cepat dan tepat. Beras merupakan hasil produksi pertanian. Berbeda dengan pandangan di atas, Dr. Husein Sawit (Staf Ahli Meneg Pangan dan Hortikultura) menyatakan bahwa kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri tetap masih relevan, khususnya pangan yang mempunyai keunggulan komparatif, baik nabati maupun hewani. Dalam kaitan ini, komoditas beras harus tetap diberikan perhatian lebih, tidak saja karena pasar beras internasional yang tipis, harga tidak stabil, pasar oligopoli dan Indonesia merupakan negara besar, tetapi juga karena beras merupakan

bahan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat, mengandung gizi serta sebagai *wage goods* dan *political goods*. Dengan tegas dinyatakan bahwa kemandirian dalam produksi beras sebagai makanan pokok utama harus menjadi kebijakan penting yang dipertahankan di masa mendatang.

Dengan menggeser fokus perhatian pada pencapaian ketahanan pangan, ketersediaan pangan tidak hanya bisa didekati dari sisi produksi, tetapi dapat dikombinasi dengan beragam pendekatan lain, yakni diversifikasi pangan, pengembangan pangan baru dan impor pangan. Sementara itu, daya beli masyarakat dapat ditingkatkan melalui pengembangan usaha-usaha produktif dan bernilai tambah tinggi. Dalam kaitannya dengan produksi beras, Indonesia perlu diperhatikan dan diperhitungkan karena beberapa sebab (Yusman (2009),

- a. Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan konsumen beras yang senantiasa dilanda masalah.
- b. Pada 1960-1980an, Indonesia merupakan pengimpor beras terbesar dunia. Untuk mengurangi impor beras dan mencapai swasembada beras nasional, Indonesia mengadopsi teknologi revolusi hijau pada tahun 1970an.
- c. Setelah swasembada beras tercapai pada tahun 1984, produktivitas padi Indonesia mengalami *leveling off* atau stagnasi produktivitas padi Indonesia sejak 1990, yang disebabkan oleh melemahnya dukungan Pemerintah terhadap petani padi.
- d. Sejak 1997 Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras. Puncaknya terjadi pada tahun 2002, saat Indonesia mengimpor 3.25 juta ton beras dari pasar dunia (setara dengan 10.2% dari total perdagangan beras dunia yang hanya mencapai 25.8 juta ton).
- e. Setelah 2002, produksi beras

Indonesia mengalami perbaikan, sehingga total impor beras Indonesia mengalami penurunan.

Sementara itu, Hidayatullah Muttaqin menyatakan bahwa beras merupakan komoditi pangan paling penting di Indonesia sehingga setiap gejolak harga beras sangat berdampak bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Laporan paling akhir BPS tentang kemiskinan menyatakan setiap bulannya pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk di bawah garis kemiskinan - GK (pengeluaran per bulan di bawah Rp 152.847) untuk membeli beras mencapai 23,10% dari uang yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga setiap kenaikan harga beras berimplikasi pada bertambahnya porsi pengeluaran penduduk untuk mendapatkannya. Artinya kenaikan harga beras apalagi dengan tingkat yang tinggi menurunkan kemampuan penduduk yang berpenghasilan rendah dan miskin untuk hidup layak. Menurut ukuran BPS penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2007 berjumlah 39,05 juta jiwa (17,75%). Namun bila menggunakan dasar perhitungan penduduk yang berada di luar garis tidak miskin dengan pengeluaran di bawah Rp 229.270 (1,5 GK) per bulan jumlahnya mencapai 128,94 juta jiwa atau 58,61% dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia. Jadi di Indonesia paling tidak ada 128,94 juta penduduk yang kondisinya kurang layak dan jumlahnya akan bertambah sebagai dampak kenaikan harga beras.

Di samping memperburuk

tingkat kesejahteraan rakyat, melonjaknya harga beras tidak otomatis menyebabkan bertambahnya penghasilan petani di Indonesia sebab pihak yang paling diuntungkan dari naiknya harga beras adalah para pedagang besar khususnya para spekulan. Apalagi sebagian besar petani di Indonesia adalah petani penggarap bukan petani pemilik lahan produksi. Petani penggarap mendapatkan upah dari lahan yang mereka garap berupa uang ataupun beras. Bila harga beras naik biaya yang mereka keluarkan untuk membeli beras bertambah. Sementara pendapatan petani dari penjualan beras dibatasi oleh kebijakan pemerintah berupa adanya ketetapan Harga Pokok Produksi (HPP) sehingga kenaikan harga beras tidak menyebabkan pendapatan petani bertambah baik. Menurut Dedi J Chandra dari Tim Media Departemen Pertanian, Bulog hanya mau membeli padi dan beras dari petani paling tinggi sesuai HPP. Konsekwensinya berapapun kenaikan harga beras, petani hanya bisa menjualnya kepada Bulog paling tinggi pada tingkat HPP yang telah ditentukan pemerintah. Misalnya ketika harga beras merangkak naik Rp 5.000/kg di akhir tahun 2006 lalu, petani hanya bisa menjualnya kepada Bulog dengan harga paling tinggi berdasarkan HPP yakni Rp 3.550/kg untuk beras dan Rp 1.730/kg untuk gabah kering panen (GKP), padahal saat itu Bulog melakukan OP dengan harga Rp 3.700/kg. Sekretaris Jenderal Serikat Petani Indonesia (FSPI) Henry Saragih menilai Inpres 13/2005 yang mengatur HPP sebesar Rp 3.550/kg untuk beras sudah tidak layak dan merugikan petani sehingga perlu ditinjau ulang.

Memang benar kenaikan harga beras sangat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Tetapi kemiskinan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh pelarangan impor beras melainkan karena struktur ekonomi yang timpang. Hasil penelitian Bank Dunia tersebut hanyalah

alat legitimasi untuk membuka kran impor beras oleh pemerintah. Penelitian tersebut tak ubahnya "pelacuran intelektual" sebagaimana kita pernah mendapatkan hasil penelitian LPEM UI tahun 2005 lalu yang menyatakan pencabutan subsidi dan kebijakan menaikkan harga BBM akan mengurangi angka kemiskinan. Adalah sangat menggelikan jika negeri ini dalam menuntaskan kemiskinan menerima begitu saja resep Bank Dunia melalui metode impor beras dan pencabutan subsidi.

Kenyataan OP beras yang dilakukan pemerintah melalui Bulog tidak dijual di bawah harga HPP membuktikan bahwa Bulog ingin mendapatkan keuntungan dari selisih harga HPP dengan harga jual. Harga HPP beras yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 3.550/kg, sementara Bulog menjual dengan harga Rp 4.000/kg walaupun kemudian pemerintah menurunkannya lagi menjadi Rp 3.700/kg. Sebagai simulasi, OP yang digelar Bulog di seluruh daerah berjumlah 68 ribu ton untuk bulan Februari 2007. Dengan harga OP Rp 3.700/kg keuntungan kotor yang diperoleh Bulog sebesar Rp 150/kg atau sekitar Rp 10,2 milyar untuk penjualan 68 ribu ton beras OP. Menurut Dedy Chandra, jika dengan membeli beras petani di bawah harga HPP saja Bulog sudah mendapatkan untung cukup besar, apalagi bila beras yang dijual ke masyarakat adalah beras impor dengan harga pokok yang jauh lebih murah dan dijual dalam jumlah besar. Satu informasi menyatakan beras Vietnam harganya Rp 2.200/kg dengan harga OP Rp 3.700/kg berarti setidaknya terdapat Rp 1.500 selisih harga beli dengan harga jualnya. Bila beras yang diimpor dan dijual ke masyarakat sebanyak 500 ribu ton maka keuntungan kotor sudah menjanjikan sebesar Rp 750 milyar. Ini baru berbicara Bulog saja belum lagi keuntungan yang dapat diperoleh oleh pedagang besar dan importir swasta.

Kebijakan impor beras yang

dikatakan pemerintah untuk menolong daya beli petani justru mendapatkan tentangan dari para petani sendiri. Para petani yang tergabung dalam Jaringan Petani Nelayan Indonesia menolak kebijakan impor beras karena tidak menyelesaikan masalah pasokan dan harga beras yang melambung. Menurut mereka permasalahan terletak pada manajemen stok dan manajemen distribusi. Menurut Icu Zukafril, Koordinator Nasional Jaringan Petani Nelayan Indonesia, kebutuhan beras Indonesia tahun 2006 sebanyak 32 juta ton dan masih terdapat surplus beras 2,7 juta ton sehingga tidak masuk akal bila impor beras dilakukan (<http://www.antara.co.id/seenws/?id=53209>)

Penutup

Iwan Gardono S. (2001), menganjurkan di dalam reformasi konstitusi (UUD) Indonesia, kita lebih memperhatikan kondisi sosiologis dan empirik, tak membatasi diri pada aspek normatif dan legal. Perhatian khusus mesti diberikan pada berbagai kelompok vertikal ("multi strata") (petani, nelayan, buruh, sektor informal, masyarakat adat). Menetapkan substansi konstitusi baru yang lebih "populis" itu akan membuka peluang kita dapat menghasilkan "bangunan sosial" yang lebih adil dan tangguh.

Indonesia perlu mencanangkan pentingnya ketahanan dan kemandirian pangan. Membangun kemandirian dan ketahanan pangan nasional harus dilandasi dengan sistem dan kebijakan pangan yang menekankan pada upaya swasembada pangan yang kokoh dan sustain, serta pengelolaan program yang terencana, bertahap dan profesional dengan keberpihakan kepada rakyat. Ritung dan Hidayat (2007) menyatakan untuk merealisasikan swasembada pangan nasional diperlukan upaya peningkatan produksi melalui tiga cara yaitu: (1) peningkatan produktivitas dengan menerapkan teknologi usaha tani terobosan, (2) peningkatan luas areal panen melalui peningkatan intensitas tanam dan pembukaan areal baru, (3) peningkatan penanganan panen dan pasca panen untuk menekan kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah.

Introduksi teknologi pertanian yang selama ini dinilai sebagai terobosan dalam meningkatkan produk-

tifitas pertanian (penggunaan sarana pertanian kimia sintetis: pupuk kimia dan pestisida kimia) perlu ditinjau ulang. Sudah saatnya para petani Indonesia menggunakan teknologi yang ramah lingkungan yang telah terbukti memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan produktivitas dan teruji bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan tetapi juga mampu menjaga kelestarian produksi dan ramah lingkungan. Disamping itu teknologi yang diterapkan harus bersifat sederhana, mudah dimengerti dan dilaksanakan petani sehingga dapat diterapkan di lapangan secara utuh dan memiliki kawalan/pendampingan di lapangan untuk menjamin keberhasilannya.

Data tentang jumlah petani dan luas lahan pertanian memang mengkhawatirkan dan membuat banyak orang resah. Namun, jika memperhatikan potensi lahan pertanian secara umum, Indonesia masih cukup potensi atas luasan lahan pertaniannya. Moeljopawiro (2002) mengemukakan bahwa perluasan lahan pertanian di Indonesia masih sangat luas. Berdasarkan kondisi biofisik lahan (fisiografi, bentuk wilayah, lereng, iklim), dari 188,2 juta hektar total daratan Indonesia, lahan yang sesuai untuk pertanian adalah seluas 100,7 juta hektar, yaitu 24,5 juta hektar sesuai untuk lahan basah (sawah), 25,3 juta hektar sesuai untuk lahan kering tanaman semusim, dan 50,9 juta hektar sesuai untuk lahan kering tanaman tahunan. Dari 24,5 juta hektar lahan yang sesuai untuk lahan basah, 8,5

juta hektar di antaranya sudah digunakan untuk lahan sawah. Namun karena adanya konversi (alih guna) lahan sawah, maka luas lahan sawah baku saat ini sekitar 7,8 juta hektar. Sekitar 16 juta hektar lahan sesuai untuk perluasan lahan sawah yang terdiri dari 3,5 juta hektar lahan rawa dan 12,5 juta hektar lahan non rawa. Lahan non rawa yang berpotensi dijadikan sawah tersebar di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di pulau Jawa lahan yang sesuai tersebut kebanyakan sudah digunakan untuk keperluan lain sehingga hampir tidak mungkin melakukan ekstensifikasi sawah di pulau Jawa. Luas lahan pasang surut dan lebak di Indonesia diperkirakan mencapai 20,19 juta hektar dan sekitar 9,5 juta hektar berpotensi untuk pertanian serta 4,2 juta hektar telah di reklamasi untuk pertanian (Ananto, 2002). Kendala utama pengembangan di lahan ini adalah keragaman sifat fisiko-kimia seperti pH yang rendah, kesuburan rendah, keracunan tanah dan kendala bio-fisik seperti pertumbuhan gulma yang pesat, OPT dan cekaman air.

Dalam jangka pendek, strategi perluasan areal pertanian dapat diprioritaskan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur (alang-alang) yang luasnya sekitar 8,5 juta. Sebagian (1,08 juta ha) lahan tersebut telah didelineasi kesesuaiannya pada skala 1:50.000, yang tersebar di 13 propinsi. Lahan tersebut sangat berpeluang dikembangkan baik untuk tanaman semusim maupun tahunan, terutama di daerah transmigrasi di mana infrastruktur cukup baik dan tenaga kerja tersedia. Di samping itu, terdapat lahan rawa (pasang

surut) yang sudah pernah direklamasi seluas 4,19 juta ha, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal dan bahkan dilerantarkan. Lahan yang telah dikembangkan hanya seluas 835.200 ha, sehingga masih terbuka peluang untuk pengembangan dan perluasan areal lahan sawah, tentunya dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan lahan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Selain itu, lahan sawah irigasi yang ada sekarang ini, perlu dipertahankan keberadaannya karena sawah tersebut telah menghabiskan investasi yang besar dalam pencetakan dan pembangunan jaringan irigasinya, misalnya dengan menetapkan lahan sawah abadi (RPPK, 2005)

Dalam konteks ketahanan pangan, Krisnamurthi (2003) mengusulkan agar dapat memfokuskan diri pada pada pelaksanaan agenda pengembangan ketahanan pangan sebagai berikut :

- 1). Mencegah dan mengurangi laju konversi lahan produktif.
- 2). Memanfaatkan dengan lebih optimal berbagai bentuk sumberdaya lahan (lahan kering, lahan rawa, lahan pasang surut) untuk kepentingan pemantapan produksi pangan dan peningkatan pendapatan petani.
- 3). Mendukung usaha, peningkatan produktivitas usaha pertanian, terutama melalui peningkatan penggunaan bibit unggul dan mengurangi kehilangan hasil pasca panen.
- 4). Melakukan rehabilitasi, pemeliharaan dan optimasi pemanfaatan infrastruktur irigasi dan jalan desa.
- 5). Melakukan berbagai langkah kongkrit dalam konservasi sumberdaya tanah dan air, terutama dalam wilayah aliran sungai.
- 6). Mempromosikan produksi dan konsumsi anekaragam pangan berbasis sumberdaya lokal, baik yang berbasis tanah maupun berbasis air (laut, danau, sungai), dengan menyertakan masyarakat

dan dunia usaha.

- 7). Mengembangkan sistem informasi pangan yang dapat diakses secara terbuka, termasuk pengembangan peta potensi pangan daerah.
- 8). Mengembangkan berbagai kelembagaan pendukung produksi dan distribusi pangan, terutama kelembagaan pembiayaan, penelitian, penyuluhan, dan pendidikan.
- 9). Mengembangkan berbagai sistem insentif yang diperlukan bagi peningkatan produksi pangan dan peningkatan pola konsumsi pangan beranekaragam.

Dalam situasi dimana mekanisme pasar yang tidak terkontrol, maka yang perlu dilakukan adalah suatu kebijakan yang jelas-jelas dan tegas pro petani. Upaya tersebut harus diimbangi dengan upaya untuk menaikkan daya tawar petani produsen, karena inilah salah satu persoalan yang mendasar, yaitu lemahnya posisi petani dalam permainan pasar, dan lemah dalam relasi ekonomi dengan pelaku lainnya. Upaya menaikkan daya tawar petani produsen dilakukan dengan konsolidasi petani produsen dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Konsolidasi tersebut *pertama* dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian, meliputi kolektifikasi modal, kolektifikasi produksi, dan kolektifikasi pemasaran. Kolektifikasi modal adalah upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya, misalnya dengan gerakan simpan-pinjam produktif yang mewajibkan anggota kolekte menyimpan tabungan dan meminjamnya sebagai modal produksi, bukan kebutuhan konsumsi. Hal ini dilakukan agar pemenuhan modal kerja pada awal masa tanam dapat dipenuhi sendiri, dan mengurangi ketergantungan kredit serta jeratan hutang tengkulak.

Kedua, kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara

kollektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kollektif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak produsen. Efisiensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi maka akan dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi, dan kemudahan dalam pengelolaan produksi, misalnya dalam penanganan hama dan penyakit. Langkah ini juga dapat menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara produsen yang justru akan merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam.

Ketiga, kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengikis jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai yang tidak menguntungkan.

Bukan perkara mudah untuk dilakukan. Perlu dukungan organisasi dan pengorganisasian tani. Upaya ini juga harus diikuti dengan merubah orientasi pengorganisasian tani yang cenderung politik dan mengkritisi kebijakan nasional dan

global menuju gerakan yang ekonomi politik. Pemberdayaan pertanian melalui program-program developmentalis masih berkuat pada tata kelola, produksi, dan pemasaran pada level mikro harus diimbangi dengan program advokasi yang bisa mengintervensi pada rantai pemasaran dan usaha merubah struktur pasar.

Perubahan struktur pasar, tata niaga dan pola relasi dalam pemasaran produk pertanian yang memihak dan mensejahterakan petani harus ditekan dari dua sisi, kebijakan pertanian yang pro petani, dan konsolidasi kekuatan ekonomi petani produsen yang dibangun dari bawah.

Upaya ini dimulai dengan pembangunan kekuatan ekonomi pertanian dari bawah, dimulai dari kelompok-kelompok tani dengan melakukan kolektifikasi seluruh aktifitas ekonomi, agar petani produsen lebih berdaya dalam perang kepentingan dengan pelaku pasar lain. Dimulai dari hal kecil, menyadarkan dan menggerakkan anggota kelompok tani untuk bekerjasama, berko-operasi, dan menjadikan kelompok sebagai organisasi politik dan ekonomi adalah hal yang harus dilakukan

Untuk menjamin kesejahteraan petani dan distribusi pangan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. *Pertama*, agenda land reform yang diamanatkan oleh Undang-undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960, dan dikuatkan dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, harus segera dilaksanakan. Hal ini untuk menjamin bahwa petani bisa memperoleh lahan yang layak untuk produksi pangan.

Kedua, karena banyak petani yang hanya memiliki lahan sempit, maka perlu dibangun *corporate farming*. Dalam konsep ini, petani-petani kecil akan bergabung dalam satuan areal yang luas untuk memproduksi pangan secara bersama-sama. Hal ini akan menjadikan proses produksi lebih efektif dan efisien waktu, biaya dan tenaga. Disamping itu, petani juga

bisa melakukan bargaining dengan pembeli (tengkulak), karena mereka menjualnya dalam jumlah yang banyak secara kollektif.

Ketiga, pemerintah harus bisa menjamin akses pasar dan modal bagi petani. Seringkali, kedua hal tersebut menjadi kendala bagi petani untuk melangsungkan proses produksinya. Akses modal akan menjamin seleainya proses produksinya dengan baik, sedangkan akses pasar akan menjamin harga yang layak bagi petani.

Keempat, sebenarnya fungsi BULOG sebagai pengaman ketersediaan pangan adalah sangat strategis. Hanya saja, BULOG tidak berhubungan langsung dengan petani, tetapi menggunakan perantara kontraktor sebagai pemasok gabah dengan berbagai persyaratannya. Hal ini menimbulkan lemahnya akses petani terhadap program pengadaan pangan BULOG. Dan akhirnya, yang menikmati keuntungan tetap saja para pedagang besar. Disisi lain, BULOG kadangkala melakukan impor beras, dimana produksi petani cukup berlimpah. Tentunya, harga gabah di petani menjadi jatuh, yang kemudian dimanfaatkan oleh pedagang untuk keperluan memenuhi kebutuhan BULOG. Dalam hal ini, sebagai BUMN, BULOG harus secara tegas memosisikan diri sebagai mitra petani untuk pemenuhan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima, keragaman pangan yang dimiliki oleh rakyat, sebaiknya dipelihara dengan baik. Keragaman pangan akan membantu petani untuk bebas menentukan jenis tanaman pangan yang akan ditanamnya. Disisi lain, keragaman pangan juga akan mempermudah rakyat untuk mencari alternatif pangan, apabila pangan pokoknya sedang langka. Tentunya, hal ini akan lebih menjamin berkurangnya kelaparan yang diderita oleh rakyat. Apalagi, saat ini diberapa kota besar, masyarakat sudah mulai terbiasa dengan tidak makan nasi, tetapi menggantinya dengan

roti, mie, atau sayuran.

Negara-negara maju melakukan proteksi terhadap petani-petani mereka, proteksi itu bisa dalam bentuk insentif, ketersediaan penunjang pertanian, bahkan harga jual yang layak. Mungkin pemerintah bisa mulai meniru mereka, misalnya dengan menjamin ketersediaan bibit murah, pupuk murah dan tidak menjatuhkan harga komoditi pertanian di tingkat petani. Bukankah petani juga bagian dari masyarakat Indonesia?

Harmonisasi Demokrasi Kerakyatan terhadap Ekonomi Kerakyatan oleh karena itu mutlak diperlukan, dan untuk itu harus didasarkan pada kesepakatan politik yaitu ;

(1) bahwa 9 Bahan Pokok itu adalah hajat hidup orang banyak [Pasal-33 (2) UUD45] dan

(2) bahwa 9 Bahan Pokok itu adalah Hak Dasar Rakyat Banyak yang tunduk kepada "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" [Pasal-28A UUD45].

Sehingga dengan demikian, maka dapat diturunkan beberapa perangkat perundang-undangan lain guna terselenggaranya operasi pencapaian maksud dan tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia [Pembukaan UUD45], melalui misalnya program-program Ketahanan Pangan yang pada gilirannya berdampak kepada Ketahanan Bangsa. Program-program Ketahanan Pangan itu antara lain berbasis Politik Diversifikasi Pangan, dari pola tradisional sampai dengan Pola Modern, dari Perdesaan sampai dengan Perkotaan, dibarengi Politik Budaya Pangan yang tepat manfaat.

[Suara Pembaruan, 24 Pebruari 2007]

Dalam bidang pertanian Indonesia dan negara-negara berkembang terperangkap dalam jebakan negara-negara maju dalam bentuk perdagangan bebas dan pasar bebas yang dinaungi oleh organisasi *World Trade Organization* (WTO). Negara-negara berkembang didesak oleh negara-negara maju agar membuka pasar dalam negeri mereka dengan menghilangkan proteksi pertanian nasional baik dengan pencabutan subsidi maupun dengan penghapusan hambatan tarif. Sebaliknya negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Inggris, Jerman dan Prancis melakukan proteksi luar biasa terhadap para petani mereka dalam bentuk subsidi, hambatan tarif, dan halangan-halangan impor lainnya. Negara-negara maju tersebut menyadari betapa pentingnya pertanian bagi perekonomian dan vitalnya ketahanan pangan untuk kemandirian negara.

Dalam rangka mengantisipasi masalah pangan, perlu dilakukan diversifikasi pangan, dengan penggalakan pangan lokal sebagai substitusi beras dan terigu. Meskipun Indonesia kaya dengan pangan lokal yang memiliki kandungan gizi setara dengan beras, sayangnya belum banyak yang mampu mengolahnya dengan optimal. Padahal, dari olahan tepung singkong saja, aneka macam jajan pasar, makanan tradisional, kudapan internasional semacam pizza, dengan cita rasa yang tak kalah yummy.

Diversifikasi pangan, dapat dilakukan baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Diversifikasi produksi a.l. dilakukan melalui;

(a) pengembangan pangan karbohidrat khas Nusantara spesifik lokasi seperti sukun, talas, garut, sagu, jagung dan lain-lain,

(b) pengembangan produk (*product development*) melalui peran industri pengolahan untuk meningkatkan cita rasa dan citra produk pangan khas nusantara (*image product*) dan

(c) peningkatan produksi dan ketersediaan sumber pangan protein (ikan, ternak) dan zat gizi mikro

(hortikultura). Sedangkan diversifikasi konsumsi pangan terkait dengan upaya mengubah selera dan kebiasaan makan.

Karena itu, pokok kegiatan ini berupa peningkatan pengetahuan, sosialisasi, dan promosi mengenai pola pangan beragam, bergizi, berimbang. Pendekatan pengembangan diversifikasi konsumsi pangan jangan diidentikkan dengan kegiatan pengentasan kemiskinan, tetapi merupakan upaya perbaikan konsumsi gizi dan kesehatan.

Dengan mengonsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi, dan dengan kandungan nutrisi yang berimbang, maka kualitas kesehatan akan semakin baik. Hasil ikutannya adalah, konsumsi beras per kapita diharapkan menurun. Hasil ikutan ini sama pentingnya dengan pencapaian tujuan utamanya tadi. Apabila upaya-upaya tersebut di atas berhasil dilakukan maka:

(a) produksi padi dan pangan sumber karbohidrat lain serta protein dan zat gizi mikro akan semakin meningkat,

(b) konsumsi beras per kapita akan menurun, dan

(c) kualitas konsumsi pangan masyarakat akan semakin beragam, bergizi dan berimbang.

Namun, sayangnya program diversifikasi pangan yang pernah dilakukan di Indonesia tidak menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan oleh karena tingkat konsumsi beras masih tinggi sebaiknya masyarakat yang sebelumnya memanfaatkan umbi-umbian sebagai makanan pokok justru beralih ke beras. Selain itu, penilaian masyarakat Indonesia terhadap komoditas pangan non beras yang keliru menyebabkan program diversifikasi pangan sulit berkembang. Orang masih memandang kalau tidak makan beras itu belum makan (Sinar Tani, 5 Desember 2007)

Kebutuhan dan pemanfaatan pangan lokal, memang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor tradisi dan budaya masyarakat. Karena itu, pro-

gram penggalakan program pangan lokal sebagai substitusi beras sebagai bahan pangan pokok perlu tetap terus dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi-inovasi sehingga masyarakat sadar dan berpartisipasi. Artinya, masyarakat perlu diajak memahami bahwa beras dan terigu bukan satu-satunya pangan yang dapat mengenyangkan dan hanya sebagai alternatif sehingga efektivitas gerakan diversifikasi pangan dapat signifikan. Masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa kesehatan dan kekuatan tubuh sangat dipengaruhi oleh berapa karbohidrat, protein, mineral dan vitamin yang kita konsumsi dan berapa energi yang dihasilkan, yang kesemuanya itu terdapat di berbagai produk pangan lokal.

Dengan kreativitas, aneka bahan pangan lokal tersebut bisa diolah menjadi aneka jenis makanan yang memiliki rasa dan tampilan yang tak kalah menawan. Semua tepung lokal dari sukun, singkong, ubijalar, jagung, ganyong dapat digunakan untuk membuat kue

kering, *cake* dan pengganti nasi yang berupa nasi jagung instan, oyek, dan lain-lain sampai penggunaan seratus persen. Selain itu aneka tepung tersebut juga dapat mensubstitusi terigu sebesar 30 persen untuk berbagai produk roti, pizza. Serta dapat pula mensubstitusi tepung beras untuk jenis makanan tradisional, seperti mie, lapis, klepon yang sangat disukai anak-anak dan remaja, juga bergizi.

Upaya meningkatkan dan menjaga produktifitas pertanian dewasa ini tidak cukup dilakukan hanya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, tetapi juga meliputi upaya melindungi dan menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Dalam hal ini efek rumah kaca (*green house*) berupa perubahan iklim sudah tidak dapat dielakkan lagi sebagai akibat industri kapitalis yang sembrono dan tidak bersahabat dengan lingkungan. Untuk itu negara perlu diupayakan mengatur dan menciptakan industri, sumber energi, dan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Untuk itu negara harus memmanage, mendorong, dan membiayai riset untuk mencapai tujuan tersebut. Negara harus melahirkan dan melakukan kebijakan-kebijakan yang inovatif. Di samping kebijakan yang diarahkan ke dalam, negara juga dalam rangka melindungi rakyat dan

sektor pertaniannya harus melakukan kebijakan luar negeri yang ofensif, yakni menekan negara-negara penghasil gas emisi karbon dan merusak lingkungan untuk mengurangi dan menghilangkan kontribusinya terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan global. Kebijakan ofensif ini satu paket dalam kebijakan luar negeri Khilafah yang berorientasi dakwah dan jihad.

Program diversifikasi pangan selain sangat baik untuk tidak hanya tergantung dari satu jenis bahan pangan saja (beras misalnya), juga harus dijaga agar harus bersumber dari potensi pangan lokal. Tetapi diversifikasi dengan menggunakan bahan pangan yang harus diimpor dari luar negeri seperti halnya gandum menyebabkan timbulnya problem baru bagi bangsa ini. Keragaman jenis pangan sebenarnya sudah terjadi di negeri tercinta ini berabad-abad yang lalu. Kita mengenal suku Madura dahulu memakan jagung sebagai makanan pokoknya. Sagu dikonsumsi oleh saudara-saudara kita dari Maluku, ubi-ubian juga merupakan bahan makanan yang utama di Irian Jaya. Tiwul (gaplek) juga dikonsumsi oleh saudara-saudara kita di Daerah Istimewa Yogyakarta (Gunungkidul). Tetapi karena kita di masa Orde Baru (yang konon mempunyai obsesi menjadikan beras satu-satunya bahan makanan bangsa Indonesia), maka diversifikasi pangan yang sudah berlangsung dengan baik di beberapa daerah menjadi hilang, jadilah pola makan bangsa kita mengonsumsi satu-satunya beras sebagai bahan makan utama dan akhirnya kita menjadi salah satu bangsa pemakan beras terbesar di dunia. Setelah kita tergantung pada beras sebagai satu-satunya bahan makan utama, maka pemerintah menyadari untuk kembali menggalakkan diversifikasi bahan makanan dengan bahan lain selain beras. Sayangnya kebijakan pemerintah dalam mempromosikan bahan pangan alternatif pengganti beras adalah keliru, yaitu dengan



cara menjadikan gandum sebagai bahan pangan alternatif yang paling gencar dipromosikan (walaupun secara tidak langsung/tidak disadari) untuk pengganti beras dalam menu kita sehari-hari.

Bahkan beberapa perusahaan multinasional swasta berlomba-lomba untuk mempromosikan gandum sebagai bahan pangan alternatif selain beras. Ketergantungan kita terhadap gandum terlihat semakin meningkatnya impor gandum dari tahun ke tahun (bahkan disinyalir adanya monopoli dalam hal impor gandum yang ada saat ini). Kalau hal ini dibiarkan terus menerus berlangsung tanpa ada yang mengingatkan, maka janganlah menyesal pada suatu saat bila kita bertekuklutut pada bangsa lain hanya sekadar untuk mendapatkan belas kasihan dalam hal memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok kita. Untuk itu maka baik pemerintah ataupun semua pihak yang masih merasa berkepentingan untuk tetap menjaga harga diri bangsa ini, perlu sama-sama membuat gerakan moral untuk tidak menjadikan gandum sebagai bahan makanan utama, selain beras.

Sebagai penutup, ada sejumlah variabel yang perlu diperhatikan agar keraguan atas kesiapan Indonesia dalam memasuki pasar bebas di bidang pertanian, yakni;

(i) petani kita pernah dilemahkan secara ekonomi dan politik dalam waktu relatif lama. Misalnya, nilai tukar produk pertanian, terutama beras, cenderung turun dari tahun ke tahun;

(ii) revolusi hijau membuat petani kita mengalami ketergantungan pada industri pertanian;

(iii) setelah revolusi hijau memporak-porandakan sistem dan kultur pertanian lokal, kini revolusi pertanian mencapai fase revolusi genetik (*gene revolution*).

IBARATNYA, kita kini sedang duduk di tepi gunung es yang mengagumi keindahannya, tanpa tahu akibatnya. Di belahan dunia lain, para petani Jepang dan Korea Selatan yang sebenarnya lebih siap menghadapi pasar bebas, ternyata bereaksi keras saat pemerintah mereka membuka kran impor beras. Demikian pula di India, sejumlah organisasi petani gigih menentang pengembangan rekayasa genetika dan *intellectual property right* terhadap produk-produk pertanian (Kompas, Rabu, 10 Juli 2002)

Ketahanan pangan berkaitan dengan eksistensi petani. Kedaulatan pangan itu berkaitan dengan kedaulatan hak-hak petani, yakni ketersediaan tanah. Pengabaian apalagi penghilangan hak-hak dan kedaulatan petani merupakan kebijakan kontraproduktif terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan. Untuk itu, ke depan, sebagai solusi, pemerintah perlu memperhatikan

- Pemanfaatan sumber alam dan mata rantainya
 - Pendayagunaan lahan dan penetapan lahan abadi
 - Pemanfaatan sumber daya laut – pantai dan
 - Manajemen air dan seluruh matarantainya
 - Disparitas : Jawa dan Luar Jawa
 - Infrastruktur yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi
- Selain itu, pemerintah sebagaimana dikemukakan Kresnayana Yahya (2009) juga perlu memperhatikan sejumlah tantangan ke depan, a.l.
- Jumlah – struktur kependudukan dan sebarannya
 - Kualitas dari sisi IPM dan konsumsi
 - Pendidikan dan kesempatan kerja
 - *Leadership* dan *creativity* yang rendah
 - Otonomi daerah dan berbagai ketimpangan prioritas

- Sentralisme fiskal yang masih belum adil

DAFTAR PUSTAKA

1. Ananto, E. 2002. *Pengembangan Pertanian Lahan Rawa Pasang Surut Mendukung Peningkatan Produksi Pangan*. Makalah disampaikan Pada Seminar IPTEK padi Pekan Padi Nasional di Sukamandi 22 Maret 2002.
2. Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa Ibnu Sholah, cet I, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hal. 41.
3. Abdur Rahman Al Maliki. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Al Izzah. Bangil
4. BPS. 2001. 2005. *Statisitik Indonesia 2000, 2004*. BPS Jakarta.
5. BPS, *Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006*, Berita Resmi Statistik No. 47/IX, 1 September 2006, hal 4.
6. Bisnis Indonesia Online, *HPP Beras tidak akan Dinaikkan, 19-02-2007*, <http://www.bisnis.com>
7. Bisnis Indonesia Online, *HPP Beras tak akan Dinaikkan*.
8. Bisnis Indonesia Online, *HPP Beras tak akan Dinaikkan, 19-02-2007*, <http://www.bisnis.com>
9. Bisnis Indonesia Online, *Harga Beras Turun ke Rp 4.200/kg bila Ada Panen, 22-02-2007*, <http://www.bisnis.com/>
10. Bank Dunia, *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, November 2006, hal. X.
11. Dedy J Chandra, Candu (Politik) Impor Beras, 17-02-2007, *Republika Online*, <http://www.republika.co.id>
12. Dedi J Chandra (Candu (Politik) Impor Beras), Didik J Rachbini (Politik Beras, Beras Politik, *Kompas Online* 30-12-2006, <http://kompas.com>, Toto Subandriyo (*Pangan (Tak Pernah) Berdaulat*, *Kompas Online* 11-01-2007, <http://www.kompas.co.id>
13. Faturochman, Marcelinus Malo "Kemiskinan dan Kependudukan di Pedesaan Jawa", Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1995
14. FAO. 1996. World Food Summit, 13-17 November 1996. Rome, Italy: *Food and Agriculture Organisation of the United Nations*.
15. FAO. 1993. *Rice In human Nutrition. Food and Nutrition Series*. FAO, Rome .
16. Hutapea, J. dan Mashar, A.Z. 2005. *Ketahanan Pangan dan Teknologi Produktivitas menuju Kamandirian Pertanian Indonesia*.
17. *Harga beras rata-rata pada bulan Maret 2006 mencapai Rp 4.330/kg* (lihat *Kompas Online*, *Harga Beras OP Jadi Rp 3.700*, 19-01-2007, <http://kompas.com/kompas-cetak>).
18. Irawan. B. 2003. *Konversi Lahan Sawah di Jawa dan Dampaknya terhadap Produksi Padi dalam Kasryno et al.* (Eds). *Ekonomi Padi dan Beras Indonesia*. Indonesian Agency for Agricultural Research and Development, Jakarta.
19. International Forum on Globalization. 2003. *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan. Pustaka Rakyat Cindelar*: Yogyakarta
20. Krisnamurthi, B. 2003. *Agenda Pemberdayaan Petani dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional*. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*. Th. II - No. 7, Oktober 2003.
21. Kliping koran HKTI berita-berita pertanian 1999, 2000, 2001, 2002
22. Khush G.S.. 2002. *Food Security By Design: Improving The Rice Plant in Partnership With NARS*. Makalah disampaikan Pada Seminar IPTEK padi Pekan Padi Nasional di Sukamandi 22 Maret 2002.
23. Kantor Berita Antara, *Petani Tolak Kebijakan Impor Beras*, <http://www.antara.co.id/seenws/?id=53209>
24. Moeljopawiro, S. 2002. *Bioteknologi Untuk Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Padi*. Makalah disampaikan Pada Seminar IPTEK padi Pekan Padi Nasional di Sukamandi 22 Maret 2002.
25. Mantra, Ida Bagus, "Mobilitas Penduduk Sekuler dari Desa ke Kota", Yogyakarta Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1995
26. PPK-LIPI. 2004. *Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Demografi Rumah Tangga*. Seri Penelitian PPK-LIPI No. 56/2004. Jakarta: Puslit kependudukan LIPI.
27. *Pikiran Rakyat*. 15 Maret 2007. *Kebijakan Pangan Harus Dirombak, Konsep yang Ada Sudah tidak Sesuai Dinamika* .
28. RPPK. 2005. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis: Tinjauan Aspek Kesesuaian Lahan*; Rangkuman Kebutuhan Investasi.
29. Ritung, S., dan A. Hidayat . 2007. *Potensi dan Ketersediaan Lahan untuk Pengembangan Pertanian melalui Pendekatan Citra Satelit*. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian.
30. Republik Indonesia. 2002. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2000 Tentang Ketahanan Pangan*. Jakarta: Sekretaris Negara RI.
31. Raharto, Aswatini, 1999. *Kehidupan Nelayan Miskin di Masa Krisis* dalam Tim Peneliti PPT-LIPI: *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kehidupan Keluarga Kelompok Rentan: Beberapa Kasus* Jakarta: PPT-LIPI bekerjasama dengan Departemen Sosial Republik Indonesia.
32. Raharto, Aswatini dan Haning Romdiati. 2000. *Identifikasi Rumah Tangga Miskin*, dalam Seta, Ananto Kusuma et.al (editor), *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII*, hal: 259-284. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
33. Steven Greenhouse dalam Microsoft Encarta Reference Library 2005.
34. Soegijoko, Sugiyanto, *Bunga Rampai Pembangunan di Indonesia* Jakarta Gramedia, 1997 Press Release FAO No. 00/43
35. Siswono Yudho Husodo, *Membangun Kemandirian Di Bidang Pangan: Suatu Kebutuhan Bagi Indonesia*, Artikel - Th. II - No. 6 - September 2003]
36. Sayogyo, *Demokrasi dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta Gramedia Widiasarana, 1996
37. Toto Subandriyo, *Karawang (Kembali) Bergoyang*, *Kompas Online* 26-02-2007, <http://www.kompas.co.id>
38. Tomich, Thomas P dan kawan-kawan, *Transforming Agrarian Economics: Opportunities Seized, Opportunities Missed*, Ithaca : Cornell University Press, 1995
39. Taqyuddin An Nabhaniy. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Risalah Gusti: Surabaya (terj. Nidzomul Iqtishodi fil Islam-Hizbut Tahrir)
40. William K. Tabb. *Globalization. Dalam Encarta Reference Library Premium 2005* rti yang terjadi di Seattle 1999 saat diadakan pertemuan WTO, dimana terjadi protes besar-besaran yang melibatkan sekitar 30.000 demonstran yang tergabung dalam 500-an NGO.
41. Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. 5, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal. 208-20
42. Yahya, Krenayana (2009), *Pelatihan LEAD Kohor 14, tanggal 29 April 2009 di Jakarta*